

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA SEKECAMATAN PANGKAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Affan Almishri**

**NPM : 4319500154**

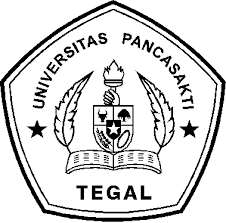
Diajukan Kepada :

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**



**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA SEKECAMATAN PANGKAH**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**Affan Almishri**

**NPM : 4319500154**

Diajukan Kepada :

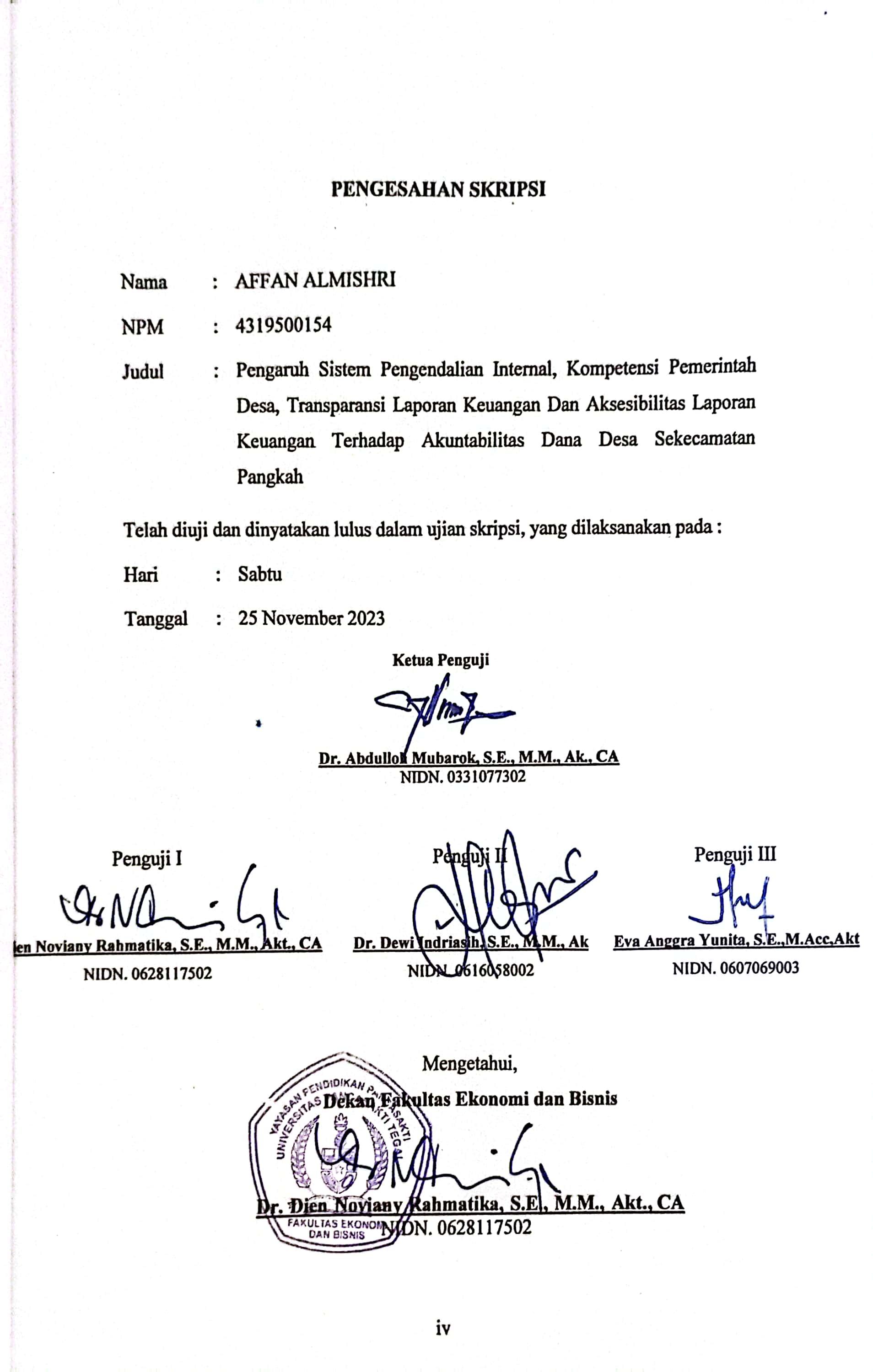
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**





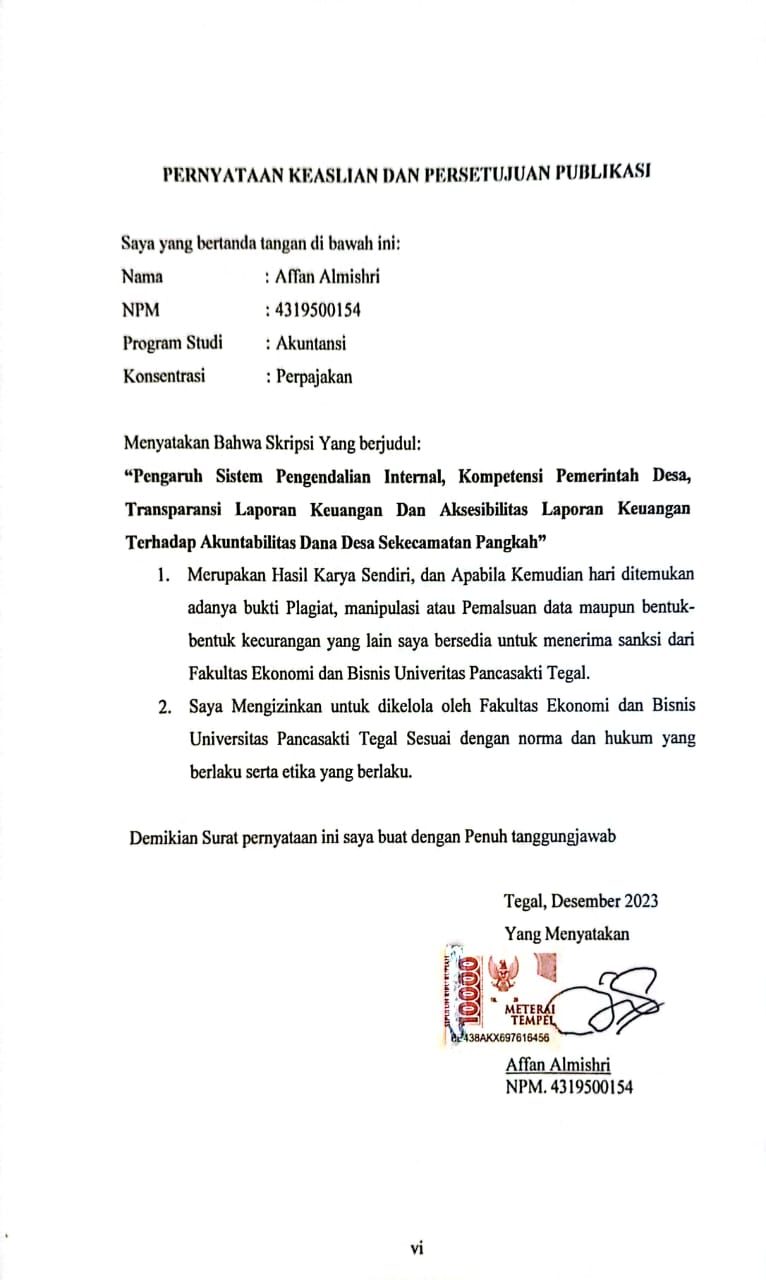
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

“Perjuangan meraih mimpi adalah hal manis yang akan dikenang saat tercapai”

**PERSEMBAHAN**

1. Terima Kasih Kedua Orang Tua yang Telah memberikan dukungan dan semangat serta Doa yang Tentunya Tiada henti untuk Keberhasilan Saya.
2. Terima Kasih Kepada SMP Negeri 2 Pangkah di Tempat Saya Bekerja
3. Terima Kasih Kepada Seseorang yang Sedang saya Perjuangkan dalam Doa



**ABSTRAK**

**Affan Almishri,** Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Sekecamatan Pangkah

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas dana desa, 2) Untuk mengetahui Kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas dana desa, 3) Untuk mengetahui Transparansi Laporan Keuangan derhadap akuntabilitas dana desa. 4) Untuk mengetahui Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas dana desa.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuisioner. Sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa 1) sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, artinya semakin baik penerapan sistem Pengendalian Internal maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik, 2) Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, artinya semakin baik sistem Kompetensi Pemerintah Desa maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik, 3) Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh akuntabilitas dana desa, artinya semakin baik Transparansi Laporan Keuangan maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik, 4) Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, artinya semakin baik Aksesibilitas Laporan Keuangan maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik.

**Kata Kunci : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Sekecamatan Pangkah**

**ABSTRACT**

**Affan Almishri***, The Influence of Internal Control Systems, Village Government Competence, Financial Report Transparency and Financial Report Accessibility on Village Fund Accountability Sepangkah District*

*The objectives of this research are 1) To determine and analyze the influence of the Internal Control System on the accountability of village funds, 2) To determine the village government's competency regarding the accountability of village funds, 3) To determine the transparency of financial reports on the accountability of village funds. 4) To determine the accessibility of financial reports to the accountability of village funds*

*This research method uses quantitative research. The data collection technique used in this research is the questionnaire method. Meanwhile, the data analysis methods used are classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing.*

*The conclusions of this research prove that 1) the Internal Control system influences the accountability of village funds, meaning that the better the implementation of the Internal Control system, the better the accountability of village funds, 2) Village Government Competency influences the accountability of village funds, meaning that the better the Village Government Competency system then the accountability of village funds will also be better, 3) Transparency of Financial Reports influences accountability of village funds, meaning that the better the transparency of Financial Reports, the accountability of village funds will also be better, 4) Accessibility of Financial Reports influences accountability of village funds, meaning that the better the Accessibility of Reports Financially, the accountability of village funds will also get better.*

***Keywords: The Influence of Internal Control Systems, Village Government Competence, Financial Report Transparency and Financial Report Accessibility on Village Fund Accountability Sepangkah District***

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia –Nya kepada kita semua, Sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Sekecamatan Pangkah”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E., M.M.,Akt selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Drs. Baihaqi Fanani, MM., Akt.,CA selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasinya kepada peneliti.
4. Eva Anggra Yunita, S.E.,M.Acc, Akt selaku Dosen pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasinya kepada peneliti.

Kami menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian, peneliti berharap Skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Desember 2023

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

ABSTRACTviii

KATA PENGANTAR ix DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 12
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

1. Landasan Teori 14
2. Penelitian Terdahulu 27
3. Kerangka Pemikiran Konseptual 35
4. Hipotesis 41

BAB III METODE PENELITIAN 43

1. Jenis Penelitian 43
2. Populasi dan Sampel 43
3. Definisi Konseptuan dan Operasionalisasi Variabel 45
4. Metode Pengumpulan Data 49
5. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 52
6. Metode Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN 59

1. Gambaran Umum Ojek Penelitian 59
2. Hasil Penelitian ……………….. 61
3. Deskripsi Responden 61
4. Pengujian Validitas 65
5. Pengujian Reliabilitas 69
6. Pengujian Asumsi Klasik 73
7. Analisis Regresi Berganda 75
8. Pengujian Parsial 77
9. Koefisien Determinasi 78
10. Pembahasan 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86

1. Kesimpulan 86
2. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 99

**DAFTAR TABEL**

**Tabel Halaman**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 30

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 44

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 48

Tabel 3.3 Skala Likert 50

[Table 4.1 Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner](#_bookmark38)  61

[Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin](#_bookmark38)  62

[Table 4.3 Deskripsi Responden berdasarkan Umur 62](#_bookmark39)

[Table 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 63](#_bookmark40)

[Table 4.5 Jabatan Responden 63](#_bookmark40)

[Table 4.6 Lama Bekerja Responden 64](#_bookmark40)

[Table 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 65](#_bookmark44)

[Table 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 69](#_bookmark45)

Table 4.7 Hasil Hasil Uji Statistik Deskriptif 70

Table 4.8 Hasil Uji Normalitas 73

Table 4.9 Hasil Uji Multikollinearitas 74

Table 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 75

Table 4.11 Hasil Pengujian Parsial 77

[Table 4.12 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 78](#_bookmark46)

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar Halaman**

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Konseptual 41

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas .................................................... 74

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Halaman**

1. Kuesioner Penelitian 100
2. Hasil Pengujian Validitas Akuntabilitas Dana Desa 108
3. Data Penelitian Variabel Sistem Pengendalian Internal 109
4. Data Penelitian Variabel Kompetensi Pemerintah Desa 110
5. Data Penelitian Variabel Tranparansi Laporan Keuangan 111
6. Data Penelitian Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan 112
7. Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas 113

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa/kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya (Sugiman, 2018).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa (Siregar, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Siregar, 2020).

Paradigma pembangunan desa adalah “membangun desa” yang berarti pemerintah mengalokasikan Dana Desa serta menjalankan program pembangunan desa Paradigma dalam pembangunan kini terus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan desa. Segenap program pembangunan menjadikan desa sebagai sasaran sekaligus aktor pembangunan didalamnya Salah satunya adalah Desa Kendal Serut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Desa dengan 5 RW dan 23 RT ini menjadi pioner pembangunan pasar tradisional di wilayah Kecamatan Pangkah. Menurut Supriatin selaku Kepala Desa Kebijakan membangun pasar tradisional adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga yang ingin berjualan di pasar tersebut,” ujarnya. Dikemukakan Pembangunan Los Pasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 sebesar Rp.165.145.000. Sedangkan untuk Pembangunan Toilet Pasar yang juga berasal dari APBDes tahun 2017 sebesar Rp.34.142.000. Alokasi Dana Desa anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa yang mana sumbernya dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten (Ratnadila, 2018).

Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota (Hilmi, 2021).

Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Alokasi APBN sebesar 10%, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban ini berpedoman pada Permen No 113 tahun 2014. Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, menurut Safitri (2015) maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah menaikkan Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 Pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 70 triliun. dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Pada tahun 2021 Pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar tersebut, maka akan sangat rawan untuk terjadinya penyelewengan atau korupsi atas Dana Desa yang telah diberikan kepada aparat pemerintah desa. Pemerintahan Desa adalah tingkat pemerintahan terkecil yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah desa juga dapat membantu pemerintah pusat dalam melakukan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, dan kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Soleh, 2017).

Dalam melakukan kegiatannya memerlukan pengawalan, oleh karena itu pemerintah bersama dengan legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara keseluruhan dan bertanggungjawab (Yusriani, 2020).

Desa memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2006) Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Namun demikian penyelenggaraan menurut pemerintahan tersebut tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembanggunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih madiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah nyata berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa dari segi sumber daya khususnya modal untuk pengembangan desa dalam rangka menunjang dilakukannya pembangunan desa yaitu dengan mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah (pasal 72 ayat(3)) dan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (pasal 72 ayat(4)), serta sumber daya lain yang berasal dari masyarakat maupun pendapatan lain yang sah (Mamonto, 2021).

Pemberian dana dari pemerintah pusat ke desa yang sangat besar tentunya menuntut pertanggungjawaban yang besar pula. Menurut Presiden Joko Widodo Hati-hati dalam Pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit. Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten / kota seluruh Indonesia. Selain dana desa, terdapat pendapatan desa yang lainnya seperti alokasi dana desa, dana bantuan dari pemerintah provinsi/kota/kabupaten dan dana bagi hasil pajak/retribusi daerah. Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap kecurangan berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertangggungjawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung jalannya pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara semestinya kearah yang lebih maju dapat dijalankan, masyarakat desa diharapkan bisa dengan seksama mengawasi jalannya pemrintahan desa agar kecurangan dapat diminimalisir (Suci, 2019).

Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan ke sektor perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dala skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatann desa lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Irma, 2006).

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki entitas. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Mais dan Palindri, 2020).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Menurut Dewi (2018) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Lebih lanjut, Lochhead (1989) menambahkan selain adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transpararansi *public*.

Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 Pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing (Aziiz, 2019).

Secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Menurut Widyatama (2017) Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). Palu: Stie Panca Bakti.Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah asymmetry information yang terjadi atas laporan keuangan di Publikasikan kepada publik. Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi akuntabilitas, transparansi serta peran perangkat desa suatu organisasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kinerja yang membuktikan hasil yang beragam.

Penelitian ini menggunakan *accountability framework* yang dikembangkan oleh Kinerja untuk menginvestigasi secara komprehensif faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). Lebih lanjut mengemukakan bahwa *accountability framework* yang dikembangkan merupakan tingkatan/level akuntansi agar akuntabilitas publik bisa berjalan dengan baik yang dimulai dari tahapan *accounting infrastructure* yaitu mengungkap tentang sejauh mana akuntan yang profesional mampu mengelola dana keuangan Lebih lanjut, tahapan selanjutnya adalah *accounting practice dan accounting culture* (COSO, 2013).

Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Kondisi serupa dipertegas oleh Sahala Purba, Rintan Saragih, dan Tika Meisiska Br Sembiring (2022) yang menjelaskan mengenai pentingnya peran auditor internal dalam mendukung *corporate governance* sebuah entitas. Namun agar peran auditor internal berhasil guna mendukung *corporate governance* maka diperlukan kompetensi yang cukup dalam menjamin keberhasilan manajemen dan integritas dalam suatu entitas.

Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas menurut adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber yang diperoleh di BPK terdapat hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Tegal masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengendalian intern pemerintahan masih kurang efektif (Rohman, 2009).

Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah peran perangkat desa, Peran perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa menurut Marsidi (2017). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik *(Good Governance)* juga desentralistis. Faktor kompetensi, sistem pengendalian dan peran perangkat desa yang telah diuraikan sebelumnya diduga dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa.

Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparatur pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. dapat dikategorikan sebagai bagian *accounting infrastructure, accounting culture, dan accounting practice* berdasarkan *accountability framework* yang dikembangkan oleh (Sahala Purba, Rintan Saragih, dan Tika Meisiska Br Sembiring, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa terdapat hasil yang berbeda-beda, di antaranya penelitian yang dilakukan menunjukan faktor Kompetensi Aparatur Desa secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Penelitian dari Aziiz (2019) menunjukan bahwa: 1) Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Indrianasari (2017) menunjukan Perangkat Desa berperan positif dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

* 1. Apakah Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah?
  2. Apakah Kompentesi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah?
  3. Apakah Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah?
  4. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

* 1. Untuk Mengetahui Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah.
  2. Untuk Mengetahui Kompentesi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah.
  3. Untuk Mengetahui Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah.
  4. Untuk Mengetahui Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sekecamatan Pangkah.

1. **Manfaat Penelitian**

**Manfaat dalam penelitian ini adalah:**

* 1. Aspek Praktis
     1. Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa.
     2. Diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.
  2. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan teori yang diterima sehingga diperoleh kriteria daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio kemampuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembelajaran dan acuan untuk peneliti selanjutnya.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
   1. **Teori Stewardship *(Stewardship Theory)***

Teori Stewardship merupakan bagian dari teori agency. Menurut Donaldson dan Davis (1989) teori stewardship menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori stewardship didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajamen. Teori stewardship memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan *utility steward* dan *principal*.

Tuntutan akuntabilitas organisasi sektor publik menjadikan principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi – fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki principal mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber daya tersebut kepada *Steward* pola kepemimpinan dan hubungan atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Kepala Desa dan Perangkat Desa *(Stewards)* cenderung termotivasi untuk berlaku sesuai keinginan dari Pemerintah *(principals)*. Menurut Teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *Stewards* malakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara principals dan stewards, maka steward akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *Stewardship theory* adalah *(stewards)* menyelaraskan tujuan sesuai tujuan *principals* namun bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan.

Penerapan Teori stewardship digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberiksan kepada Pemerintah Desa *(Stewards)* dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori Stewardship pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

* 1. **Sistem Pengendalian Internal (SPI)**
     1. **Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah PP No 60 Tahun 2008 (P R, Indonesia, 2008).

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (COSO, 2013:11).

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu proses yang melibatkan seluruh entitas dari pihak manajemen guna menyancpai tujuan dari organisasi. Pengendalian internal dilaksanakan guna memberikan kepastian tentang reabilitas pelaporan keuangan organisasi, efektifitas dan kepatuhan pada hukum serta undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu sistem pengendalian internal ialah ha; yang wajib dilakukan dan diterapkan oleh pihak yang bersngkutan (Sihotang, 2019:37).

* + 1. **Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan yang umum dimiliki oleh manajemen dengan menerangkan sistem pengendalian internal yang efektf sebagai berikut (Lubis, 2020:176):

* + - 1. Reabilitas Pelaporan Keuangan

Manajerial bertanggungjawab guna menyiapkan laporan bagi para investor, kreditur dan yang lain. Guna mematikan bahwa sebuah infomasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan yang berlaku seperti prinsip akuntansi dan tujuan pengendalian internal yang efektif atas lapora keuangan ialah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut (Putri Rizqiyah Y, Dien Noviany R, dan Baihaqi Fanani, 2018).

* + - 1. Ketaatan Pada Hukum dan Peraturan

Seperti organisasi yang lain, yang mengeluarkan laporan tetang keefektfam pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, semua bentuk organisai diwajibkan menaati berbagai hulum dan peraturan. Dan secara tidak langsung dengan akuntansi seperti UU Perlingdungan lingkungan dan hak sipil. Sementara itu berkaitan erat dengan akuntansi peperti halnya peraturan pajak penghasilan dan keuangan.

* + - 1. Efisiensi dan Efektifitas Operasi

Pengendalian dalam sebuah organisasi mendorong danya enggunaan umber daya secara efisien dan efektif guna mengoptimalkan sarana-sarana organisasi. Tujuan dari pengendalian itu sendiri ialah dapat memperoleh informasi keuangan serta non keuangan yang akurat mengenai operasi pengambilan sebuah kepuusan.

* + 1. **Komponen Pengendalian Internal**

Terdapat lima komponen yang dijelaskan mengenai Pengendalian Internal (Diny & Bz, 2016):

* + - 1. Lingkungan pengendalian.
      2. Penilaian Risiko.
      3. Infomasi dan Komunikasi.
      4. Pengawasan Aktivitas Pengendalian.
  1. **Kompetensi Pemerintah Desa**

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Menurut Surat keputusan Mendiknas No. 045/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tetentu. Byars dan Rue (1997), mendefinisikan kompetensi sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Berdasarkan pengertian diatas, maka dikatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat berkinerja dengan baik.

Menurut Gibson (2003), *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Mangkunegara (2001), mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Pemerintah desa menurut Surasih dalam Serpiner (2016) suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa (wikipedia). Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintah desa yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa yangbertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Ahmad (2017), kinerja pemerintah desa merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat setempat, hal ini merupakan bentuk sebuah pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai bentuk pelayanan yang diberikan terdapat pelayanan administrasi dan non administrasi. Kegiatan yang diberikan oleh pemerintah desa merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah desa. Berdasarkan pengertian di atas, kinerja pemerintah desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

* 1. **Transparansi Laporan Keuangan**

1. **Pengertian Transparansi**

Merupakan sebuah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan diasebuah organisasi. Yang dapat beruapa keterbukaan infomasi, komunikasi dan budgeting. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaam sumber daya publik. Transparansi terutama pada infomasi keuangan dan fisikal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah untuk dipahami. Transaparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan mengenai tugas kewenangan, ketersediaan infomasi kepada hayalak publik,proses penganggaran yang terbuka,dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan infomasi, fisikal dan penjabaran dengan adanya transaparansi, maka dapat menjamin akses atau kebebasn bagi setiap orang guna memperoleh infomasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yakni infomasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanannya serta hasil-hasil yang dicapai (Simanjorang, 2018).

1. **Manfaat Transparansi Laporan Keuangan**

Manfaat dari adanya transaparansi Laporan Keuangan adalah pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran; dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan; sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa; sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan; sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan undang-undang. menciptakan kepercayaaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakata melalui penyediaan infomasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh infomasi yang memadai dan akurat. Transparansi memberikan keterbukaan dalam menympaikan infomasi yang lengkap, benar dan tepat (Haryanti & Kaubab, 2019).

1. Dapat dengan mudah mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan.
2. Dapat meningkatan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah Mencegah terjadina korupsi.
3. Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitme pemerintah guna memutuskan kebijakan tertentu.
5. **Tujuan Transparansi Laporan Keuangan**

Tujuan dari sebuah tansparansi Laporan Keuangan adalah Dalam pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan sangat penting untuk memantau kinerja keuangan desa. Dengan menggunakan keuangan desa online, semua transaksi keuangan desa dapat tercatat dengan baik, sehingga laporan keuangan dapat dibuat dengan lebih mudah dan akurat. Hal ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa guna menjelaskan tentang bagaimana sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparansi, masyarakat akan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan pemerintah selama satu periode. Dan seberapa besar anggran yang digunakan, serta bagaimana hasil dari tindakannya.

1. **Indikator Transparansi Laporan Keuangan**

Terdapat indikator mengenai transparansi Laporan Keuangan yang terdiri dari (Nuraenna, 2022):

* + - 1. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggran yang meliputi:
         1. Kerangka Kerja Hukum.
         2. Adanya Akses Masyarakat terhadap transparansi.
         3. Adanya Audit Independen.
         4. Adanya Keterlibatan Masyarakat.
      2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran, antara lain:

1. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil guna berparsipasi dalam proses penganggaran.
2. Adanya keterbukaan infomasi selama proses penyusunan anggaran.
   * + 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, yang meliputi:
3. Adanya peraturan perundang yang mengatur persoalan transparansi.
4. Adanya basis legal pajak.
5. Adanya pembagian peran dan tangungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintah.
6. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defiasi yang jelas tentang peran dan tangungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisikal.
7. Adanya bisnis legal guna petanggunngjawaban Belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
   * + 1. Adanya audit independen dan efektif,yang meliputi:
          1. Adanya kantor stastistik yang akurasi datanya berkualitas
          2. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
          3. Adanya sisem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekutif atau keputusan anggaran.
   1. **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Menurut Tjiptono (2014) arti dari kata aksesibilitas yang dilalui atau mudah dijangkau sarana tranportasi umum Menurut Rohman (2009) Aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan. Aksesibilitas Keuangan merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif.

Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Menurut Apriliani, dkk., (2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkaan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

* 1. **Akuntabilitas Dana Desa**

Akuntabilitas *(Accountability)* merupakan keharusan menyampaikan pertanggungjawaban tentang kinerja seseorang maupun badan hukum kepada pihak-pihak yang meminta pertanggungjawaban. Bisa juga di jelaskan bahwa merupakan kewajiban pemegang amanah untuk menyampaikan, melaporkan seluruh kegiatan serta aktifitasnya yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan dengan baik dan disampaikan kepada pemberi amanah padanya. Akuntabilitas merupakan keharusan dalam menerangkan unjuk kerja dan juga tindakan seseorang atau organisasi kepada pemberi amanah pekerjaan. Akuntabilitas bila dikaitkan dalam organisasi pemerintah desa merupakan kinerja yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dalam hal penggunaan anggaran dimana semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dilaporkan dengan tuntas setiap tahap-tahap pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas dana desa adalah pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang baik, sebagai bukti unjuk kerja (kinerja) dan pertanggungjawaban tersebut belum tentu diterima, atau bahkan dicela dalam Membagi akuntabilitas terdiri dari Akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan / penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran Akuntabilitas manfaat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang terkait dengan hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas Akuntabilitas prosedural dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terkait dengan pentingnya prosedur pelaksanaan dalam mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum (Yunita, 2021).

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang mempunyai variabel yang sama digunakan peneliti sebagai referensi untuk penelitian ini. Berikut peneliti sajikan tabel penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Ada beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu yaitu:

1. Embun Widya Sari (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten IndraGiri Hulu, hasil yang Diperoleh dari analisa data yaitu internal control system (SPI) dan aksesibilitas mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara mempresentasikan Laporan Keuangan dan gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas.
2. Syarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017) Pengaruh Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey dengan populasi dan sampel yaitu aparat pengelola dana desa dengan jumlah responden 120. Hasil yang didapat bahwa (1). pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2).Komitmen organisasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Bani Renggo (2018) Pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian adalah perangkat Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 6 desa,sampel yang digunakan dengan menggunakan purposive sampling yaitu perangkat desa yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan keuangan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.
4. Amanda Mutiara Sweetenia, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, Annisa Hakim Purwantini (2019) pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa Populasi yang dilakukan adalah aparatur desa dalam lingkup pemerintah Kabupaten Magelang, dengan menggunakan sampel purposive sampling. Hasil Uji R Square menunjukkan bahwa nilai R square 0,352. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan ADD dapat dijelaskan oleh variabel.
5. Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018) Pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi empiris di Desa-Desa Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, objek yang digunakan adalah 106 desa di kabupaten Rokan Hulu. Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan pada variabel senjangan anggaran, asimetri informasi, komitmen organisasi dan group cohesiveness memiliki rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,130), maka dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 yang berarti bahwa data.
6. Dewi & Gayatri (2019) Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
7. Afrijal (2018) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, KabupatenTanggamus). Diketahui bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan, variabel akuntabilitas berpengauh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
8. Prasetyo (2018) Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). Diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
9. Hardinin gsih et al., (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten pemalang). Diketahui bahwa variable, system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan.
10. Arif Widyatama (2017) Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Peran Aparatur Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dari Pemerintah Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

| **No.** | **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Peneliti** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Embun Widya  Sari ( 2017 ) | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten IndraGiri Hulu | hasil yang Diperoleh dari analisa data yaitu internal control system (SPI) dan aksesibilitas mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara mempresentasikan Laporan Keuangan dan gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu.  Dilanjutkan |
| 2 | Syarifudin  Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel  (2017 ) | Pengaruh Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas  pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. | Penelitian ini penelitian  kuantitatif dengan menggunakan metode survey dengan populasi dan sampel yaitu aparat pengelola dana desa dengan jumlah responden 120. Hasil yang didapat bahwa (1). pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2).Komitmen organisasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3)partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model persamaan 75,10% dan sisanya sebesar 24,90%. dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.  Dilanjutkan |
| 3 | Bani Renggo  (2018) | Pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. | Populasi penelitian adalah perangkat Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 6 desa,sampel yang digunakan dengan menggunakan purposive sampling yaitu perangkat desa yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan keuangan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan dengan bantuan aplikasi SPSS. |
| 4 | Amanda Mutiara Sweetenia, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, Annisa Hakim Purwantini (2019) | pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa | Populasi yang dilakukan adalah aparatur desa dalam lingkup pemerintah Kabupaten Magelang, dengan menggunakan sampel purposive sampling. Hasil Uji R Square menunjukkan bahwa nilai R square 0,352. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas  pemerintah daerah dalam pengelolaan ADD dapat dijelaskan oleh variabel  Dilanjutkan |
| 5 | Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018) | Pengaruh sistem  pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi empiris) di Desa-Desa Kabupaten Rokan Hulu. | Hasil penelitian menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, objek yang digunakan adalah 106 desa di kabupaten Rokan Hulu. Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan pada variabel senjangan anggaran, asimetri informasi, komitmen organisasi dan group cohesiveness memiliki rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > 0,130), maka dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6 yang berarti bahwa data |
| 6 | Dewi & Gayatri  (2019)  Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa | Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 7 | Afrijal, (2018) | Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus) | Diketahui bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan, dan variabel akuntabilitas berpengauh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.  Dilanjutkan |
| 8 | Prasetyo, (2018) | Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman) | Diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas |
| 9 | Hardinin gsih et al., (2019) | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) | Diketahui bahwa variabel, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. |
| 10 | Arif Widyatama  (2017)  Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal  Terhadap | Peran Aparatur Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa di Kabupaten Sigi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dari Pemerintah Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Kompetensi Aparatur dari Pemerintah |
|  | Akuntabilitas  Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa |  | Desa tidak berpengaruh  signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi  Dilanjutkan  Dana Desa. |

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

1. **Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka pemikiran merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian khusunya pada penelitian kuantitatif kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori tersebut digunakan dalam rangka untuk memberikan jawaban dari pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis. (Edy Suranta Sembiring, 2012). Berdasarkan pendapat yang ada maka kerangka pikir penelitian ini:

* 1. **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Sistem pengendalian internal merupakan suatu penyajian data yang dapat dipercaya guna meningkatkan efisiensi sebuah operasional dan medorong pelaksanaan kebijakan yang ada serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal merupakan dasar guna meyelenggraan dan sebagai tolak ukur pengujian efektifitas penyenggaraan sistem itu sendiri. Dan unsur sistem pengendalian internal dalam RI No 60 tahun 2008 dan Laporan keungan proses yang mendesain guna memberikan keyakinan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (INDONESIA, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Samita, S., & Hasan, (2022) dan S. Rahayu & Kanita, (2023) mengenai system pengendalian internal menunjukan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, dengan hal ini semakin baik sistem pengendalian internal di suatu entitas tentu akan semakin baik akuntabilitas dana desa yang dihasilkan, dikarenakan segala sesuatunya diawasi sehingga tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Diperkuat dengan penelitian Andrianto & Rahmawati, (2017) menunjukan bahwa system pengendalian internal berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa, yang dimana semakin baik pengendalian internal maka semaikin baik akuntabilitas dana desa yang dihasilkan.

* 1. **Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Kompetensi merupakan suatu kecakapan, kemampuan dan keterampilan dengan kata lain kompetensi merupakan karakteristik yang melekat pada seseorang dan dapat berpengaruh langsung terhadap kinerjanya Menurut Arif Widyatama, (2017). Indrianasari (2017) menjelaskan bahwa perangkat desa merupakan aparatur desa yang dibawahi oleh kepemimpinan kepala desa yang juga termasuk kedalam salah satu unsur pemerintahan di desa memiliki peran besar terhadap kemajuaan bangsa melalui pelaksanaan perngembangan desa. kesimpulan yang sama yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh signfikan dan positif terhadap akuntabilitas dana desa Kompetensi desa adalah suatu kewajiban yang mutlak diperlukan dengan tujuan mendorong tercapainya pengelolaan dana desa yang efisien dan efektif serta mendorong pengembangan desa di berbagai aspek.

Dalam mencapai tujuan tersebut kompetensi aparatur sangat dipengaruhi oleh kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap maupun perilaku untuk mendorong kinerja pembangunan desa dapat berjalan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Yesiana, dkk. (2018) mengungkapkan beberapa kendala yang sering dialami oleh aparatur desa yang menjadi penghambat perkembangan kinerja pengelolaan dana desa yaiu tingkat kompetensi aparatur desa yang lemah yang disebabkan rata- rata perangkat desa merupakan lulusan SMA, minimnya tingkat pemahaman dalam hal penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang baik menurut sistem akuntansi pemerintahan, dan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan komputer. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan masyarakat memiliki tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa dapat menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh aparat. Kemudian, menurut Frank dan Klimoski (2004) dalam menyatakan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan adanya kompetensi.

* 1. **Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan dana masyrakat selama satu periode dan pemerintah berkewajiban memberikan infomasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan infomasi hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya, dan Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak - pihak diluar entitas. Terdapatnya asymetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen, Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkua litas dan berguna dalam pengambilan keputusan (Lubis, 2017).

Transparansi berpengaruh Positif Terhadap akuntabilitas dana desa yang artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula akuntabilitas dana desa terhadap laporan keuangan suatu SKPD (K. N. S. Rahayu & Dewi, 2022). Didukung Yusriani (2020) transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, dengan adanya transparansi menjamin maka akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai yang membuat laporan kuangan pemerintah menjadi bagus dan Penelitian yang lain menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa, yang dimana Transparansi dan Laporan Keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dimana pembuatan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan akan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Merialsa, 2017).

* 1. **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Peran pemerintah dalam mengelola keuangan desa ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat pedesaan dalam menyiapkan laporan keuangan desa yang bertanggungjawab dalam memberikan informasi keuangan dan mengawasi proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi suatu pengawasan atau pengendalian penuh aparat terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peran sebagai agen yang memiliki peristiwa penting dalam mempertanggungjawabkan kemampuan dari pemerintah kepada rakyat. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. Semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan dana desa, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam aparatur pemerintah desa, dan sistem pengendalian internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat.

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau suatu kemudahan seseorang untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut Setiawan dkk (2015) aksesibilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban publik secara terbuka dan jujur adalah berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan adanya aksesibilitas. menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa. Maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, dikarenakan semakin mudah masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam mengakses suatu laporan keuangan menunjukkan bahwa instansi tersebut telah menerapkan akuntabilitas. Membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Akses informasi terkait kinerja entitas pemerintah yang dimiliki secara mudah memungkinkan publik untuk dapat mengidentifikasi dan menilai akuntabilitasnya baik atau buruknya membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Sistem

Pengendalian

Internal (X1)

Kompetensi

Pemerintah Desa (X2)

Transparansi Laporan

Keuangan (X3)

Aksesibilitas Laporan

Keuangan (X4)

Akuntabilitas Dana Desa (Y)

H1

H2

H3

H4

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pemikiran Konseptual**

1. **Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019) Hipotesis adalah jawaban pertama atas suatu pertanyaan penelitian, dan pertanyaan itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban baru ini dianggap pendahuluan karena didasarkan pada teori-teori yang relevan dari pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban teoritis awal sebelum didukung oleh bukti empiris yang relevan.

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H2 : Kompetensi pemerintah desa berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H3 : Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H4 : Aksesibilitas Laporan keuangan berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas dana desa.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2019) penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian harus mengikuti kaidah atau ketentuan dalam penyusunannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian dengan menjelaskan suatu teori dan gambaran yang terjadi di lapangan dan menjelaskan karakteristik hubungan variabel yang akan diteliti dengan menggunakan analisis data angka (numerik) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis mengenai akuntabilitas Dana Desa. Lokasi yang dilakukan untuk penelitian ini ada pada 23 Desa yang ada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

**Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang diterapkan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi merupakan keseluruhan sumber informasi data mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pada 23 Desa di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Sampel merupakan salah satu bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019). Metode pemilihan sampel yang dilakukan secara jenuh yaitu teknik pengambilan sampel dengan semua populasi yang dijadikan sampel, hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang kecil dalam penelitian ini. Penentuan responden dengan jumlah 23 Desa yang dijadikan sampel dimana masing-masing desa terdapat 4 responden yaitu a). Kepala desa b). Sekretaris desa c). bendahara desa d). Ketua Badan Permusyawaratan Desa sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan jumlah 92 responden.

**Tabel 3.1**

**Populasi Penelitian**

| **No** | **Nama Desa** | **Jumlah Responden** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Balamoa | 4 |
| 2 | Bedug | 4 |
| 3 | Bogares Kidul | 4 |
| 4 | Bogares Lor | 4 |
| 5 | Curug | 4 |
| 6 | Depok | 4 |
| 7 | Dermasandi | 4 |
| 8 | Dermasuci | 4 |
| 9 | Dukuhjati Kidul | 4 |
| 10 | Dukuhsembung | 4 |
| 11 | Grobog Kulon | 4 |
| 12 | Grobog Wetan | 4 |
| 13 | Jenggawur | 4 |
| 14 | Kalikangkung | 4 |
| 15 | Kendalserut | 4 |
| 16 | Paketiban | 4 |
| 17 | Pangkah | 4 |
| 18 | Pecabean | 4 |
| 19 | Pener | 4 |
| 20 | Penusupan | 4 |
| 21 | Purbayasa | 4 |
| 22 | Rancawiru | 4 |
| 23 | Talok | 4 |
| **Jumlah**  Sumber : Kecamatan Pangkah Dalam Angka 2023 – Diolah Untuk Penelitian | | **92** |

**Definisi Konseptuan dan Operasionalisasi Variabel**

* + - 1. **Difenisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk menggunakan konsep yang akan digunakan di lapangan (Effendi dan Singarimbun, 2002). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

* + - * 1. **Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2021:69). Akuntabilitas Dana Desa Sekecamatan Pangkah (Y).

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. Meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri.

* + - * 1. **Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2021:69).

1. **Sistem Pengendalian Internal (X1)**

Sistem pengendalian internal Pemerintah ialah suatu proses yang sangat integral pada suatu tindakan dan kegiatan yng dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai dalam memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan didalam organisasi pemerintahan melalui pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ikriyati & Aprila, 2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP NO 60, 2008).

1. **Kompetensi Pemerintah Desa (X2)**

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar dari seorangindividu yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan, Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan, atau kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan Airsoft smith dan Millership, (2007) dalam (Diarespati, 2017).

1. **Transparansi Laporan Keuangan (X3)**

Transparansi menjadi salah satu syarat dalam menciptakan good Governace. Dengan adanya transparansi di seiap kebijakan serta keputusan dalam lingkungan organisasi maka keadilan dapat ditimbulkan yang akan mendorong pengungkpan kondisi yang sebenarnaya, oleh karena itu pemerintah berkewajiban membeikan infomasi keuangan dan infomasi lain yang akan digunakan dalam pegambilan keputusan dan transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang guna memperoleh infomasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yaitu mengenai kebijakan,proses dan pelaksanaan serta hasil yang tercapai (Rifandi, 2019).

1. **Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)**

Aksesibilitas atau keterbukaan informasi desa. Pemerintah Desa harus memberikan akses yang mudah untuk pengguna laporan keuangan bukan hanya dewan legislatif dan yudikatif namun juga masyarakat umum yang memercayai mereka untuk mengawasi dana publik Aksesibilitas adalah lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana tranportasi umum. Indikator dari aksesibilitas yaitu: Jarak; akses ke tempat lokasi, Transportasi; arus lalu-lintas (Tjiptono, 2014).

* + - 1. **Operasional Variabel**

Operasi variabel penelitian merupakan penjelasana dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Operasi variabel ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Operasional Variabel**

| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Skala** |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem  Pengendalian  Internal (X1)  Nurhasanah dkk (2018)  PP No 60 tahun 2008 | Lingkungan Pengendalian | * 1. Kebijakan Kepala Desa | Interval |
| * 1. Peran BPD |
| Penilaian Resiko | * 1. Sistem Informasi yang baru | Interval |
| * 1. Perubahan dalam lingkungan operasi |
| Kegiatan Pengendalian | 1. Pengendalian SISKU  2. Pemahaman pengelolaan dana desa | Interval |
| Informasi dan komunikasi | 1. Kejelasan | Interval |
| 1. Konsistensi |
| Pemantauan | 1. Penilaian aktivitas | Interval |
| 1. Fungsi Internal audit |
| Kompetenspi  Pemerintah Desa (X2)  Indrianasari N. T. (2017) | Pengetahuan  (Knowledge) | * + 1. Pengetahuan     2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan     3. Keahlian Teknis     4. Kemampuan mencapai solusi     5. Inisiatif dalam bekerja | Interval |
| Kemampuan  (skill) |
| Sikap  (attitude) |
| Transparansi Laporan Keuangan (X3)  HILMI (2021) | Informatif (Informative) | 1. Jelas, akurat dan Tepat Waktu   2. Mudah Diakses  3. Memadai  4. Dapat diperbandingkan | Interval |
| Keterbukaan  (Openness) | 1. Setiap informasi publik harus  bersifat terbuka  2. Setiap informasi publik harus  mudah diakses | Interval |
| Pengungkapan  (Disclosure) | 1. Kondisi Keuangan  2. Bentuk perencanaan dan hasi dari kegiatan  3. Susunan Pengurus | Interval |
| Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)  Embun Widya Sari (2017) | Keterbukaan | 1. Pemerintah desa terbuka dalam mempublikasikan   setiap laporan keuangan kepada pengguna laporan   1. Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa   Dilanjutkan | Interval |
| Kemudahan | 1. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah desa 2. Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan secara lengkap disampaikan terhadap pengguna laporan keuangan yang membutuhkan | Interval |
| Akuntabilitas Dana Desa (Y)  Mada et al (2017) | Tahap Perencanan | 1. Lembaga Desa 2. Masyarakat Umum | Interval |
| Tahap Pelaporan | 1. Laporan realisasi 2. Laporan akhir tahun | Interval |
|  | Tahap pertanggung jawaban | 1. Ketelitian 2. Transparan | Interval |

**Metode Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian terdapat dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan kuesioner yang diberikan oleh responden jadi data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, literatur, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebar kuesioner di desa yang berada dalam lingkup kecamatan Pangkah.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Nilai dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya. Kuesioner yang digunakan adalah skala likert. Tanggapan responden dibagi menjadi 5 kategori penilaian dimana setiap pertanyaan diberi skor dari 1 sampai 5, antara lain:

**Tabel 3.3**

**Skala Likert**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jawaban** | **Skor** |
| Sangat Setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Netral | 3 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Sangat Tidak Setuju | 1 |

**Wawancara**

Menurut Sugiyono (2019) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

* 1. **Kuesioner**

Menurut Sugiyono (2019) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui pos, atau internet.

* 1. **Observasi**

Menurut Sugiyono (2019) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lain.

**Uji Validitas dan Realibilitas**

1. **Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2019) pengujian validitas digunakan untuk menguji sejauh mana alat pengukur dapat mengungkapkan ketepatan gejala yang dapat diukur. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas adalah daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid tidaknya suatu data. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n - k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. Bila valid, ketetapan pengukuran data tersebut akan semakin tepat alat ukur tersebut.

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas adalah:



Keterangan:

 : koefisien korelasi antar variabel x dan y

 : Jumlah responden

ΣXY : Jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total

ΣX : Jumlah skor butir

ΣX2 : Jumlah skor butir kuadrat

ΣY : Jumlah skor total

ΣY2 : Jumlah skor total kuadrat

1. **Uji Realibilitas**

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur reliabilitas ini adalah dengan rumus koefisien alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki alpha > 0,60 (Ghozali, 2018).

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah (Suharsimi, 2019:239) :



Keterangan :

r11 : reliabilitas instrumen

K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

Σb2 : jumlah varians butir

Σ12 : jumlah varians total

**Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019) analisis data merupakan kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk peneliti yang tidak merumusukan hipotesis, langkah terahkir tidak dilakukan.

Teknik analisi data dalam penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistic. Terdapat beberapa dua macam statistic yang digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu *statistic deskriptif,* dan *statistic inferensial.* Statistik inferensial meliputi *statistic parametris* dan *statistic non-parametris.*

* 1. **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan suatu gambaran yang memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2018). Analisis ini diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang dikumpulkan serta memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

* 1. **Uji Asumsi Klasik** 
     1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji suatu data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018) Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah :

1. Jika signifikansi ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
   * 1. **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya sebuah korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor Variance Inflation Factor (VIF).* Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

* + 1. **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansinya >0,05 maka model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 26.

* 1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Terhadap Akuntabilitas Dana Desa Sekecamatan Pangkah.

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan regresi sebagai berikut:

Ŷ = a + ß1X1 + ß2X2+ ß3X3 + ß4X4+ e

Keterangan:

Ŷ = Akuntabilitas Dana Desa

a = Konstanta

ß1,2,3,4 = Koefisien regresi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Kompetensi Pemerintah Desa

X3 = Transparansi Laporan Keuangan

X4 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

e = *error of tem*

* 1. **Uji t**

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan signifikan kurang dari 0,05 (Sugiyono, 2019).

1. Apabila t-hitung < t-tabel, dan nilai signifikansinya > 0,05 dimana hipotesis diterima, artinya masing–masing variabel tarif Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dana.
2. Apabila t-hitung > t-tabel, dan nilai signifikansinya < 0,05 dimana hipotesis ditolak dan Ha diterima, artinya masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Dana.
   1. **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinan adalah kuadrat dari koefisien korelasi ganda yang dikalikan 100%. Digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan X1,X2X3X4 terhadap Y. Besar koefisien determinasi dilihat pada output Model Summary dalam kolom R Square Derajat koefisien determinasi dapat ditentukan dengan rumus (Riduwan, 2015).

**D = r2 x 100%**

Keterangan:

D = Nilai koefisien determinan atau penentu.

r2 = Nilai koefisien korelasi